



WALIKOTA SUKABUMI

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG :

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018.

Pasal 1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018 yang selanjutnya disingkat Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD adalah kebijakan umum dan program pembangunan Kota Sukabumi untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Pasal 2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Periode 2013 - 2018, yaitu :

- a. mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berilmu;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar, dan melayani masyarakat dengan ikhlas;
- c. mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; dan
- e. meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.

Pasal 3

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 1 Nopember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Madya
NIP 19580518198503 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 – 2018

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013-2018

A. Misi 1:
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa Dan Berilmu

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan sosial.	1. Menggiatkan aktivitas masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan kesetiakawanan sosial	1. Meningkatkan upaya pendidikan keagamaan bagi masyarakat. 2. Memberikan dukungan, memfasilitasi, dan/ atau melakukan koordinasi terhadap kegiatan keagamaan dan kesetiakawanan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.	1. Persentase kenaikan ZIS. 2. Jumlah masyarakat yang mendaftar melaksanakan ibadah Haji 3. Jumlah masyarakat yang mendaftar melaksanakan ibadah Umroh. 4. Jumlah masyarakat yang melaksanakan qurban.	% Orang Orang Orang	20,66 230 360 6.033	28,86 1.150 2.760 8.158	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan dan lembaga pendidikan keagamaan	1. Memberikan dukungan, memfasilitasi, dan/ atau melakukan koordinasi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan dan lembaga pendidikan keagamaan.	Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda	%	-	90	Program Pembinaan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Menurunnya laju pertumbuhan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	1. Memberikan bantuan dan meningkatkan model penanganan masalah kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi dengan kelompok/ organisasi masyarakat	1. Pengembangan model pemberdayaan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi penanganan layanan sosial dasar dan pembangunan fisik, pemberian bantuan terhadap kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.	1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani 2. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 3. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	% % %	10 10 10	10 10 10	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpecil (KAT) dan PMKS lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas	1. Menyelenggarakan atau menyertakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dalam pemenuhan kesesuaian dengan bidang pekerjaannya	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur 2. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan standar kompetensi	1. Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas 2. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	% %	80 85	90 100	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Program Pendidikan kedinasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5.	Terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan dan kearifan lokal bagi masyarakat	1. Mengoptimalkan kurikulum praktek tentang budi pekerti dan wawasan kebangsaan di sekolah	1. Melakukan penyesuaian terhadap kurikulum praktek tentang budi pekerti dan wawasan kebangsaan di sekolah, sehingga lebih aplikatif	1. Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti 2. Persentase siswa yang mendaftar ke SD yang memiliki ijazah Madrasah Diniyah	sekolah %	- 40	30 75	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca	1. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah dan melakukan sosialisasi peningkatan minat baca masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah. 2. Sosialisasi secara intensif terhadap peningkatan minat baca masyarakat.	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Orang	10.000	12.500	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

B. Misi 2 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar Dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal	1. Optimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Peningkatkan upaya intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal.	1. Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan LKPD 2. Opini BPK	Temuan	39 WDP	10 WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu	1. Penyediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu dan tepat waktu beserta SOPnya	1. Penyediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tepat waktu beserta SOPnya. 2. Menyajikan publikasi atas dokumen perencanaan daerah.	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	%	80	90	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik	1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan asset daerah	1. Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dan aset daerah, serta efisiensi belanja. 2. Penguatan regulasi daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan.	1. Rasio belanja tidak langsung pegawai terhadap APBD 2. Peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah	% Rp	≤51 859.180.759.291	≤51 1.212.279.000.000	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
4.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	1. Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh aparatur dan publik	1. Membangun dan meningkatkan sistem informasi daerah, yang memuat data dan informasi pembangunan, serta aplikatif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. Mengoptimalkan regulasi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	1. Persentase OPD yang mengisi data dan informasi di website resmi 2. Persentase OPD yang menggunakan software legal atau menggunakan OSS 3. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	% % Kelompok	18,18 60 3	100 100 7	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan informatika	Kantor Komunikasi dan Informatika
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	1. Meningkatkan setiap aspek-aspek pelayanan, guna tercapainya kepuasan yang baik bagi masyarakat	1. Memperoleh kategori baik dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3. Meningkatkan kategori kelurahan.	1. Jumlah unit pelayanan yang IKM Berketegori baik. 2. Persentase pelaksanaan SPM oleh OPD 3. Jumlah Kelurahan yang berketegori: a. Swasembada b. Swakarya c. Swadaya	UP % Kelurahan Kelurahan Kelurahan	30 30 7 21 5	55 100 20 11 2	1. Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda 2. Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan	1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 2. Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Sekretariat Daerah 2. Kecamatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD	1. Memfasilitasi efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga meningkatkan akuntabilitas DPRD pada publik	1. Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 2. Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD.	Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	Raperda	2	8	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD
7.	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak	1. Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukum, didukung oleh penyediaan informasi publik secara transparan, dengan menggunakan teknologi informasi, dan media informasi lain yang kontekstual, serta optimalisasi penegakan dan kepastian hukum melalui usulan atau penerbitan peraturan	1. Penegakan sistem reward and punishment sesuai regulasi yang berlaku. 2. Membangun mekanisme pengaduan publik yang aksesibel oleh publik.	1. Jumlah Peraturan Walikota yang diterbitkan 2. Jumlah Keputusan Walikota yang diterbitkan 3. Cakupan Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Masyarakat	Perwal Kepwal Kecamatan Kelurahan	8 200 7 33	48 1.055 7 33	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
8.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	1. Meningkatkan sistem dan cakupan layanan administrasi kependudukan	1. Meningkatkan indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan. 2. Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan.	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Cakupan penerbitan akta kelahiran	% %	78,76 89,19	98 98	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Meningkatnya pengelolaan dan	1. Meningkatkan tata kelola kearsipan	1. Pemberlakuan aturan baku sistem	1. Jumlah OPD yang sudah menerapkan	OPD	16	21	Perbaikan sistem administrasi	Kearsipan	Kantor Perpustakaan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pelayanan kearsipan daerah	daerah yang handal	pengarsipan. 2. Meningkatkan pengelolaan kearsipan berbasis digital.	pengelolaan arsip secara baku 3. Persentase kearsipan daerah berbasis digital	%	-	20	kearsipan		Umum dan Arsip Daerah

C. Misi 3

Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing di setiap jenjang pendidikan	1. Penyediaan layanan pendidikan umum, vokasional, maupun pendidikan khusus yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat	1. Menetapkan target pencapaian minimal pendidikan umum, kejuruan, maupun non formal. 2. Memfasilitasi kemampuan melanjutkan sekolah bagi keluarga miskin. 3. Meningkatkan perluasan memperoleh pendidikan dan ketrampilan.	1. Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 2. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 5. Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa drop out dan miskin 6. Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA.	% % % % %	99,99 99,7 98,8 100 100	99,99 99,95 99,7 100 100	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	1. Meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	1. Pembinaan terhadap unsur aparatur pengelola sekolah. 2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, tekno-	Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah kualifikasi S2	%	85	94	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			logi, peraturan, dan metode ajar yang baik.							
3.	Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Meningkatkan layanan terhadap ibu, anak dan bayi serta tercukupinya pemenuhan gizi masyarakat	1. Meminimalisir angka persentase balita gizi buruk. 2. Memfasilitasi kecukupan pemenuhan gizi masyarakat pada lokasi yang membutuhkan penanganan prioritas.	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 3. Cakupan Kunjungan Bayi 4. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 5. Angka Kematian Bayi	% Per 1000 kelahiran hidup	89 79 87 64,61 8,4	91 83 88 87 <24	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak 2. Program perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatnya upaya Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan Penjaringan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
5.	Meningkatnya pelayanan promotif dan preventif bidang kesehatan	1. Melaksanakan pembinaan perilaku hidup sehat bagi masyarakat	1. Peningkatan upaya pembinaan perilaku hidup sehat bagi masyarakat.	Cakupan PHBS Rumah Tangga	%	40	65	1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Program pengembangan Lingkungan sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.	Berkurangnya kasus penyakit menular.	1. Meningkatkan upaya dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular	1. Meningkatkan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization. 2. Meningkatkan cakupan penanganan penderita penyakit menular. 3. Meningkatkan cakupan remaja yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS.	1. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization 2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit TBC BTA+ 3. Cakupan remaja (15-24 th) yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS	% %	97 26 -	100 94 60	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Terwujudnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin.	1. Meningkatkan cakupan masyarakat miskin yang difasilitasi jaminan pemeliharaan kesehatan.	1. Pemberian layanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. 2. Menyediakan rumah sakit atau tempat pengobatan gratis dalam layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.	1. Cakupan masyarakat miskin yang difasilitasi oleh kartu jaminan kesehatan 2. Rumah sakit gratis untuk masyarakat miskin	% Unit	70 -	90 1	1. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2. Program pelayanan Kesehatan untuk penduduk miskin 3. Program Pangadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
8.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	1. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	1. Melakukan pengendalian terhadap vektor penyakit	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	45,5	57,5	1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Penyehatan Lingkungan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
9.	Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat.	1. Meningkatkan cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan.	1. Pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan.	Cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	96	97	Program obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
10.	Meningkatnya Pengawasan obat dan makanan	1. Meningkatkan cakupan PIRT yang bersertifikat	1. Peningkatan cakupan PIRT yang bersertifikat	Cakupan produksi industri rumah tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat	%	36	40	Program obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
11.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan.	1. Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan yang representatif.	1. Penempatan tenaga kesehatan pada unit layanan kesehatan yang sesuai tingkat kebutuhan masyarakat. 2. Peningkatan kompetensi tenaga	1. Rasio tenaga keperawatan persatuan penduduk. 2. Rasio dokter umum persatuan penduduk. 3. Rasio dokter spesialis persatuan penduduk	Per seribu penduduk Per seribu penduduk Per seribu penduduk	2,90 0,34 0,21	0,93 0,42 0,23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kesehatan.	4. Rasio dokter gigi persatuan penduduk	Per seribu penduduk	0,14	0,17			
12.	Meningkatnya pengawasan terhadap HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	1. Meningkatkan kerjasama antar tokoh agama, tokoh masyarakat, Komisi Penanggulangan HIV-AIDS dalam rangka pembinaan kepada masyarakat akan bahaya HIV-AIDS, narkoba dan zat adiktif lainnya	1. Penyusunan rencana aksi penanggulangan HIV-AIDS, penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	Cakupan pengawasan terhadap HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	%	35	52	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
13.	Meningkatnya pengembangan dan diversifikasi unit pelayanan sesuai perspektif masyarakat.	1. Meningkatkan pengembangan dan diversifikasi unit pelayanan kesehatan.	1. Pengembangan dan diversifikasi unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	1. Rasio penduduk yang memanfaatkan puskesmas 2. Tingkat Pelayanan Kesehatan Penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	% %	88,19 35	88,19 ≤ 35	1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD R. Syamsudin, SH
14.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.	1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Keluarga Berencana	1. Memperkuat kelembagaan dan jaringan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.	1. Angka laju pertumbuhan penduduk 2. Angka kepadatan penduduk 3. Usia nikah pertama 4. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 5. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	% Org/Km tahun % %	2,39 7.417,08 21,30 25,92 67,10	1,71 7.990,3 21,32 23,70 67,75	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Keluarga Berencana 4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1. Kependudukan dan Catatan Sipil 2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
15.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, melalui ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.	1. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan	1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif 2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif 3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	% % %	10 47,92 35,14	30 48,18 35,78	1. Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2. Program Peningkatan	Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			evaluasi pembangunan.					Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
16.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat	1. Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat untuk bersinergi dalam forum pembangunan ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.	1. Meningkatkan peran serta organisasi/ kelompok masyarakat untuk bersinergi dalam forum pembangunan.	1. Persentase Posyandu Aktif 2. Persentase LPM Aktif	% %	30 80,04	33 83,00	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
17.	Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi.	1. Penyusunan dokumen Rencana detail tata ruang, dan penegakan hukum implementasi RTRW.	1. Menyediakan dokumen Rencana Detail Tata Ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang serasi dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan komitmen penyediaan ruang terbuka hijau. 3. Penegakan hukum implementasi RTRW.	1. RDTR 2. Luas Ruang Terbuka Hijau: a. Hutan Kota b. Taman Kota dan Jalur Hijau c. Lahan Pemakaman	Dokumen Ha Ha Ha	- 3,18 15,00 34,20	7 11,08 21,10 34,70	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1. Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup	1. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman 2. Kantor Lingkungan Hidup 3. Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota.	1. Meningkatkan penanganan sampah, rumah tidak layak huni, dan sanitasi rumah tinggal.	1. Meningkatkan persentase penanganan sampah. 2. Meningkatkan persentase jumlah rumah layak huni. 3. Meningkatkan persentase rumah tinggal bersanitasi. 4. Meningkatkan implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	1. Persentase Penanganan Sampah 2. Persentase Jumlah Rumah Layak Huni 3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 4. Jumlah Kampung Iklim	% % % lokasi	83,35 85,15 63,63 -	84,02 86,49 72,30 5	1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Program pengembangan perumahan 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup Perumahan	1. Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman 2. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman 3. Kantor Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota.	1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, dan ketersediaan listrik serta air bersih.	2. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan yang baik, nyaman dan memenuhi standar keselamatan. 3. Peningkatan cakupan kelistrikan. 4. Peningkatan cakupan air bersih.	1. Persentase kondisi jalan baik 2. Aksesibilitas penduduk kota 3. Aksesibilitas jalan lingkungan 4. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih	% % % %	66,49 97,72 58,14 87,02	69,74 100 75,14 95,52	1. Program Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Pekerjaan Umum 2. Perumahan	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan.	1. Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas dan efisiensi layanan lalu lintas dan angkutan jalan.	1. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, yang mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah secara serasi. 2. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas lalu lintas, penegakan hukum dan disiplin di jalan.	1. Persentase fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka c. APILL siap ATCS d. Cermin Tikungan e. Pagar Pengaman f. PJU 2. Terminal tipe A	% % % % % % Unit(%)	50,00 40,00 66,67 37,50 13,00 78,75 1 (Progress Pembangunan 33%)	80,00 100,00 100,00 87,50 23,00 96,84 1 (Progress Pembangunan 100%)	1. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan

D. Misi 4

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih	1. Penerapan prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat,	1. Penerapan ISO dalam layanan perizinan dan investasi.	1. Perizinan tepat waktu 2. Persentase pengaduan yang terselesaikan	% %	80 -	80 80	Program Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	Penanaman modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.	transparan, dan sesuai kaidah keilmuan serta peraturan yang berlaku.								
2.	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	1. Penyediaan informasi di daerah dan menciptakan kondusifitas iklim investasi.	1. Penyediaan informasi Investasi daerah yang handal.	1. Nilai Investasi PMA 2. Nilai Investasi PMDN	Rp (ribu) Rp (ribu)	45.978.500 125.919.000	115.978.500 137.251.710	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja.	1. Meningkatkan fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja, dengan mengikuti kebutuhan pasar potensial.	1. Fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja dengan mengikuti kebutuhan pasar. 2. Pengoptimalan fungsi Balai latihan Kerja.	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	20%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1. Penegakan perlindungan tenaga kerja, didukung peningkatan kolaborasi dan sinergi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja.	1. Penguatan pengawasan penerapan hukum perlindungan tenaga kerja. 2. Mendorong pembukaan jenis ketrampilan <i>life skill</i> lebih beragam. 3. Melakukan analisis potensi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja.	1. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 2. Angka Partisipasi angkatan Kerja	% %	28,56 87,90	40 87,90	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1. Membangun sistem yang dapat menarik investasi berpotensi dalam penyediaan lapangan kerja.	1. Menyusun rencana aksi pengembangan investasi potensi daerah dalam penyediaan lapangan kerja.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Orang	1.038	25.000	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Ketenagakerjaan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
6.	Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha.	1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk pengembangan dan pemberdayaan	1. Meningkatkan pertumbuhan UMKM. 2. Membangun Pasar Induk. 3. Mengembangkan Pasar Tradisional. 4. Membangun Pusat	1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2. LKM : KSP / USP Aktif 3. Jumlah Pengembangan Pasar Tradisional dan pembangunan Pasar Induk	% % Unit	0,50 97,50 1	2,50 98,50 6	1. Program Pengembangan Industrin Kecil dan Menengah 2. Program Peningkatan Efisiensi	1. Koperasi dan usaha kecil menengah 2. Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		UMKM.	Promosi dan Informasi.	4. Pusat Promosi dan Informasi	Unit	-	1	Perdagangan Dalam Negeri		
7.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi.	1. Meningkatkan pertumbuhan koperasi yang berkualitas. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi.	1. Pertumbuhan koperasi 2. Koperasi aktif	% %	1 58,50	2 61,00	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi dan usaha kecil menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
8.	Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM.	1. Pengembangan kerjasama dan pemberian bantuan permodalan Usaha Mikro dan Kecil.	1. Pemberian bantuan permodalan Usaha Mikro dan Kecil.	1. Penguatan permodalan UKM 2. Kemitraan permodalan	UKM Koperasi	- 4	1.000 6	Koperasi dan usaha kecil menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
9.	Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif	1. Penanganan terhadap sengketa konsumen, fasilitasi pemasaran produk dan penataan Pedagang Kaki Lima.	1. Penyelesaian setiap sengketa konsumen. 2. Pembinaan dan fasilitasi pemasaran produk unggulan. 3. Optimalisasi penataan pedagang kaki lima.	1. Sengketa Konsumen yang diselesaikan 2. Fasilitasi pemasaran 3. Jumlah kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang	% Produk Kawasan	100 10 -	100 60 10	1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
10.	Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah.	1. Meningkatkan pemenuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutu, aman, merata, terjangkau, berkeadilan dan berkelanjutan	1. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. 3. Peningkatan ketersediaan informasi	1. Penguatan cadangan pangan pemerintah 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 4. Cakupan penanganan daerah rawan pangan masyarakat. 5. Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan	% % % % %	27 90 78 100 40	60 90 80 100 90	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 2. Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>pasokan, distribusi, harga dan akses pangan.</p> <p>4. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan.</p> <p>5. Peningkatan pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan.</p> <p>6. Penanganan rawan pangan.</p>							
11.	Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis.	1. Meningkatkan kualitas SDM agribisnis dan melaksanakan revitalisasi kelembagaan usaha bidang agribisnis	<p>1. Peningkatan kualitas sistem penyuluhan agribisnis.</p> <p>2. Peningkatan pembinaan kelembagaan usaha agribisnis</p>	<p>1. LKM-PUAP dan LKD-Demapan berklasifikasi sehat</p> <p>2. Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani</p>	<p>%</p> <p>%</p>	<p>20,83</p> <p>11,03%</p>	<p>62,50</p> <p>30,34</p>	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
12.	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis.	1. Meningkatkan pelaksanaan revitalisasi agribisnis secara menyeluruh baik agribisnis on-farm dan off-farm	<p>1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana produksi.</p> <p>2. Peningkatan pelatihan teknologi agribisnis.</p> <p>3. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk agribisnis.</p> <p>4. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana agribisnis.</p>	Jumlah produk olahan pertanian/ peternakan/ perikanan unggulan yang berkembang dan tersertifikasi	Jenis	6	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
13.	Meningkatnya kesejahteraan pelaku agribisnis	1. Meningkatkan fasilitasi permodalan dan bantuan sarana produksi agribisnis serta mengembangkan diversifikasi usaha tani	<p>1. Peningkatan fasilitasi dan pendampingan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis lainnya.</p> <p>2. Peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi usaha tani dan</p>	Nilai tukar petani		-	112	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perbaikan sistem pemasaran							
14.	Meningkatnya masyarakat Kota Sukabumi yang mengkonsumsi makanan non beras dan terigu	1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat	1. Sosialisasi tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi kepada masyarakat	1. Skor pola pangan harapan (PPH) 2. Cakupan Sosialisasi Program "One Day No Rice" kepada Masyarakat	% %	72 20	90 60	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
15.	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata.	1. Meningkatkan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata, dengan meningkatkan pelayanan bagi wisatawan.	1. Inventarisasi potensi wisata. 2. Peningkatan pembinaan penyedia layanan bagi wisatawan di lokasi objek wisata, tempat penginapan, dan sentral perbelanjaan.	1. Waktu kunjungan wisata 2. Jumlah wisatawan 3. Tingkat hunian kamar	Hari Orang %	3 95.700 52	4 154.126 57	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16.	Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya.	1. Membangun gedung kesenian sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya.	1. Terbangunnya gedung kesenian sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya.	Jumlah gedung kesenian	Gedung	1	2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17.	Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.	1. Memfasilitasi sinergi masyarakat untuk menggali dan memelihara lembaga / kelompok seni budaya.	1. Analisis terhadap stakeholder organisasi/ kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni budaya. 2. Pengembangan model Pemberdayaan organisasi/ kelompok masyarakat seni budaya untuk bersinergi dalam forum pengembangan seni budaya daerah.	1. Pembinaan kelompok seni 2. Jumlah event pagelaran budaya	Kelompok Event	- 1	76 6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan daerah.	1. Menggiatkan aktualisasi ekonomi kreatif dan memperluas jangkauan promosi untuk pencitraan daerah.	1. Analisis terhadap stakeholder organisasi/ kelompok masyarakat yang bergerak di ekonomi kreatif. 2. Pengembangan model Pemberdayaan organisasi/ kelompok masyarakat untuk bersinergi dalam forum pengembangan ekonomi kreatif.	1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang telah dibina 2. Jumlah fasilitasi ODTW kuliner	Orang Kawasan	- 1	73 6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19.	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi.	1. Mewujudkan pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu dan teratur	1. Analisis stakeholder organisasi / kelompok masyarakat yang bergerak di bidang olah raga. 2. Pembangunan dan pemeliharaan tempat-tempat olah raga. 3. Pembinaan terhadap olahragawan berprestasi.	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/nasional	%	-	40,51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berolahraga untuk menjaga kesehatan	1. Meningkatkan kegiatan olahraga di masyarakat	1. Menggiatkan kegiatan olahraga di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	11	13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21.	Meningkatnya pembinaan potensi kepemudaan dalam peran pembangunan.	1. Meningkatkan kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.	1. Pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan. 2. Fasilitasi kegiatan yang melibatkan unsur organisasi kepemudaan.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	7	17	Peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

E. Misi 5

Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat.	1. Meningkatkan upaya mendidik masyarakat untuk berlaku tertib dan disiplin, serta menjaga ketertiban umum.	1. Peningkatan penyelesaian penanganan pelanggaran Peraturan Daerah. 2. Peningkatan kapasitas anggota Polisi Pamong Praja. 3. Peningkatan kapasitas anggota Linmas. 4. Mengoptimalkan antisipasi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. 5. Optimalisasi pencegahan dan penanganan tawuran pelajar.	1. Tingkat penyelesaian pelanggaran perda 2. Persentase demo yang tertangani 3. Tingkat pengendalian keamanan lingkungan 4. Persentase antisipasi gangguan keamanan, ketentrman, dan ketertiban masyarakat di Kota Sukabumi 5. Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar 6. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kota/kabupaten	% % % % % %	70 100 - 90 - -	100 100 95 100 50 95	1. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1. Polisi Pamong Praja 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana.	1. Meningkatkan kesadaran dan ketanggapan masyarakat dan aparatur terhadap bencana.	1. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap penanggulangan bencana. 2. Optimalisasi penanganan korban dari kejadian bencana.	1. Persentase Tingkat Kesiapan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penanggulangan Bencana 2. Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana	% %	- -	1,22 100	1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	Meningkatnya pembinaan politik daerah, Lembaga swadaya masyarakat, dan	1. Meningkatkan pembinaan politik bagi masyarakat, serta melakukan pendataan terhadap Lembaga	1. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat. 2. Pendataan terhadap Lembaga swadaya	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada 2. Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar	% %	76.79 45	78 90	1. Program pendidikan politik masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Organisasi Kemasyarakatan.	swadaya masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan.	masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan.							
4.	Terwujudnya kerukunan antar dan antar umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama.	1. Meningkatkan peranan MUI, FKUB dan Lembaga Keagamaan lain guna meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan.	1. Melaksanakan revitalisasi peranan MUI, FKUB dan Lembaga Keagamaan lain guna meningkatkan kerukunan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan.	1. Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama	%	22,39	10	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
5.	Meningkatnya penanganan persampahan perkotaan.	1. Penyediaan tempat pengelolaan persampahan, baik berupa TPST, unit bank sampah dan Pengelola Daur Ulang Sampah.	1. Tersedianya tempat pengelolaan persampahan, baik berupa TPST, unit bank sampah dan Pengelola Daur Ulang Sampah pada lokasi yang representatif.	Persentase Reduksi Sampah Kota	%	1,25	4,51	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
6.	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota.	1. Meningkatkan eksistensi kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan.	1. Pemeliharaan rutin kebersihan dan keindahan lingkungan. 2. Peningkatan jumlah kawasan atau lokasi yang mendapatkan penanganan khusus kebersihan dan keindahan lingkungan. 3. Melakukan penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian dan pemerintahan secara bertahap yang berjalan di wilayah kota baru	1. Jumlah jalan tertib sampah 2. Jumlah perumahan tertib sampah 3. Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru	Ruas Jalan Lokasi Ha	7 4 -	12 9 20	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Lingkungan Hidup 2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1. Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman 2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Meningkatnya biopori dan tanaman yang menyerap air	1. Meningkatkan pembuatan biopori dan penanaman tanaman yang menyerap air	1. Perluasan atau peningkatan kawasan ruang terbuka hijau. 2. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah RTH Jalur Hijau 2. Jumlah RTH Taman Kota	Ruas Jalan Lokasi	22 17	32 27	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

Sukabumi, 1 Nopember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ